

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP) 2023 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
KATA PENGANTAR.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Isu Strategis.....	6
1.5 Cascading Kinerja.....	7
1.6 Peta Proses Bisnis.....	9
1.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.1 Rencana Strategis	12
2.2 Tujuan dan Sasaran	13
2.3 Kebijakan, Strategi dan Program	15
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
3.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023	22
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023	30
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan akhir periode Renstra	31
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target/SPM)	33
3.5 Akuntabilitas Keuangan.....	34
3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran	35
3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38
3.8 Prestasi dan Penghargaan.....	39
BAB IV PENUTUP	

DAFTAR LAMPIRAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Matrik Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026
2. Rencana Kinerja Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 beserta Lampiran Perubahan
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2023
6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2023
7. Penghargaan

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Lingkungan Kota Dumai Tahun 2023	xii
Tabel 2	Program Kerja Dinas Dinas Lingkungan Kota Dumai Tahun 2023	xiii
Tabel 3	Perubahan Program Kerja Dinas Dinas Lingkungan Kota Dumai	xiv
Tabel 4	Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023	xv
Tabel 5	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Dinas Lingkungan Kota Dumai Tahun 2023	xvi
Tabel 6	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Dinas Lingkungan Kota Dumai Tahun 2023	xviii
Tabel I. 1	Rekomendasi atas Evaluasi SAKIP Tahun 2023	10
Tabel I. 2	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	10
Tabel II. 1	Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Dinas Lingkungan Kota Dumai Tahun 2023	14
Tabel II. 2	Strategi dan Kebijakan Dinas Dinas Lingkungan Kota Dumai Tahun 2023	15
Tabel II. 3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Dinas Lingkungan Kota Dumai Tahun 2023	16
Tabel II. 4	Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Lingkungan Kota Dumai Tahun 2023	17
Tabel II. 5	Program Kerja Dinas Dinas Lingkungan Kota Dumai	17
Tabel II. 6	Program Kerja Perubahan Dinas Dinas Lingkungan Kota Dumai	18
Tabel III. 1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	21
Tabel III. 2	Atribut Capaian Indikator Kinerja	22
Tabel III. 3	Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	23
Tabel III. 4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	30
Tabel III. 5	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra	31
Tabel III. 6	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional	33
Tabel III. 7	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)	35
Tabel III. 8	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	36
Tabel III. 9	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38
Tabel Iii. 10	Prestasi dan Penghargaan Dinas Dinas Lingkungan Kota Dumai Tahun 2023	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1	Struktur Organisasi Dinas Dinas Lingkungan Kota Dumai	5
Gambar I. 2	Cascading Kinerja Dinas Dinas Lingkungan Kota Dumai.....	8
Gambar I. 3	Peta Proses Bisnis Dinas Dinas Lingkungan Kota Dumai.....	9
Gambar II. 1	Misi ke - 3 Kota Dumai.....	13
Gambar III. 1	Dokumentasi Kegiatan Uji Udara Ambien dan Uji Air Permukaan Tahun 2023.....	24
Gambar III. 2	Dokumentasi Koordinasi Potensi Proklamasi KTH.....	27
Gambar III. 3	Dokumentasi TPA/TPS Tahun 2023	29

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKj ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang Lingkungan Hidup efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Dinas Lingkungan Hidup

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Dumai, 10 Januari 2024

KEPALA,

AGUS GUNAWAN, S.Sos
Pembina I/(IV/a)
NIP. 197708312000031005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas yaitu membantu Walikota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, maka sebagai unsur teknis, Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai menjalankan fungsi:

- a.** penyusunan rencana dan program kerja dinas;
- b.** perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya;
- c.** pimpinan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Dinas;
- d.** pengesahan dan penandatanganan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- e.** pemberian rekomendasi dan perizinan teknis, serta pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- f.** pembinaan pelaksanaan tugas UPT;
- g.** pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- h.** pelaksanaan koordinasi dengan Instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
- i.** pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Walikota dalam pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya;
- j.** pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

- k. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya

Kota Dumai melaksanakan MISI yang ke 3 RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 yaitu “Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas” dan SASARAN yang ke 1 yang merupakan Tujuan Strategis Organisasi yaitu “Mewujudkan Pelestarian lingkungan hidup yang berkualitas”

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai 2021 - 2026 telah menetapkan 1 (satu) Tujuan dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 - 2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 12 Program, 18 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2023 antara lain:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah

4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan bahan logistik
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau Bangunan Lainnya

7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

9. Peningkatan Pelayanan BLUD

- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

B. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

1. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPLH) Kabupaten/kota
 - Penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten kota
 - Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup

C. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup Kabupaten/kota

D. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan (KEHATI).

E. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

F. Program Pengelolaan Persampahan

1. Pengelolaan Sampah
 - Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.

G. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat.

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup.

H. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat

1. Kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/Kota
 - Penilaian Kinerja Masyarakat /Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

I. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

- Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota.

2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

- Pembuatan dan Pelaksanakan KLHS untuk Krp yang berpotensi menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

J. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)

1. Pengumpulan Limbah 3

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengelolaan, dan Penimbun

K. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)

1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin

PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Fasilitas Pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan izin PPLH.
- Pengawasan usaha dan kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel I
Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai pada Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup	Indeks kualitas air	53,3
		Indeks kualitas udara	71
		Indeks kualitas tutupan lahan	61
		Persentase jumlah sampah yang tertangani	65,7

Sumber data : Perjanjian Kinerja Perubahan DLH Kota Dumai, 2023

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis PD sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 36,554,398,949 (untuk melaksanakan 2 (dua) Program Kerja antara lain :

Tabel 2
Program kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Rp. 5.694.679.364,-	APBD
2.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 579.727.930	APBD
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp. 10.614.417.668	APBD
4.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 1.792.888.500	APBD
5.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 140.000.000	APBD
6.	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Rp. 28.701.700	APBD
7.	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Rp. 133.380.000	APBD
8.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 149.495.787	APBD
9.	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Rp. 65.479.536	APBD
10.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 55.463.061	APBD

11.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 9.228.192.727	APBD
J U M L A H		Rp. 29.303.287.473	APBD

Sumber data : Dlh Kota Dumai, 2023

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Rp. 5,716,192,764	APBD-P
2.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 824.451.930	APBD-P
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp. 10.614.417.668	APBD-P
4.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 1.792.888.500	APBD-P
5.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 338.000.000	APBD-P
6.	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Rp. 28.701.700	APBD-P
7.	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Rp. 133.380.000	APBD-P
8.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 149.435.087	APBD-P
9.	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Rp. 65.479.536	APBD-P
10.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 55.463.061	APBD-P
11.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 10.049.114.627	APBD-P
J U M L A H		Rp. 36.554.398.949	APBD-P

Sumber data : DLH Kota Dumai, 2023

Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan

keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2023	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1.	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	53,3%	53,3%	100%				
		Indeks Kualitas Udara	73	71	100%				
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	61	61	100%				
		Persentase jumlah sampah yang tertangani	65,7%	65,7%	100%				

Sumber data : DLH Kota Dumai, 2023

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Dinas lingkungan Hidup Kota Dumai selama tahun 2023 termasuk kategori 1 (satu) yaitu SANGAT BERHASIL

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Lingkungan Hidup Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 36.554.398.949 bersumber dari APBD Kota Dumai. Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp. 28.288.445. dan BELANJA MODAL sebesar Rp 8.265.953.081

1. Belanja Operasi
2. Belanja Modal

J u m l a h

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun
2023

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Tujuan: Mewujudkan Pelestarian lingkungan hidup yang berkualitas	indeks kualitas air	53.3	53.3	100%			
Sasaran: Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup	Indeks kualitas udara	71	71	100%			
	Indeks kualitas tutupan lahan	61	61	100%			
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	65.7	65.7	100%			
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	75%	75%	75%	6,674,297, 782	5,574,397,2 34	99,05%

Program perencanaan lingkungan hidup	Persentase perencanaan lingkungan hidup	75%	75%	75%	1,792,888,500	1,458.256.651	99,96%
Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	75%	75%	75%	1,262,451,930	1,162,951.250	95,55%
Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	70%	70%	70%	12,117,701,188	11,065,701,000	95,55%
Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun	70%	70%	70%	28,701,700	25,600,700	99,55%
Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	73%	73%	73%	133,380,000	125,145,200	97,55%
Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	73%	73%	73%	149,435,087	135,435,257	94.05%

Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	75%	75%	75%	65,479,536	59.025.321	93.25%
Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat	75%	75%	75%	55,463,061	50,363,000	99.23
Program pengelolaan persampahan	Persentase timbulan sampah yang tertangani	65.7%	65.7%	65.7%	14,274,600, 165	13,123,978,4 75	92,67%

Sumber data : DLH Kota Dumai Tahun 2023

Sebagaimana uraian tersebut diatas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2023. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi		Keterangan
1	2	3	4	5	6		7
1.	Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	Indeks kualitas lingkungan hidup	61,55	99,05	1,01	Efisien	-
		Jumlah pelayanan persampahan yang tertangani	65,7	99,05	1,47	Efisien	-

Sumber data : DLH Kota Dumai Tahun 2023

- a. Pada *Indikator Kinerja Utama 1* yaitu *Indeks kualitas lingkungan hidup* tingkat efisiensinya adalah 1,01 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (61,55) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,05%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- b. Pada *Indikator Kinerja Utama 2* yaitu *Jumlah pelayanan persampahan yang tertangani* adalah 1,47 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (65,7) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,05%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKjIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau prosentase

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKjIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E/Noreg Peraturan Daerah Provinsi Riau (8.38.A/2021));
4. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D).
5. Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas yaitu membantu Walikota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2023 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D) dan dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang berhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

- a. penyusunan rencana dan program kerja dinas;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya;
- c. pimpinan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Dinas;
- d. pengesahan dan penandatanganan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- e. pemberian rekomendasi dan perizinan teknis, serta pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- f. pembinaan pelaksanaan tugas UPT;
- g. pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
- i. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Walikota dalam pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya;
- j. pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- k. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) subbagian yakni :
 - 2.1 Fungsional Perencana
 - 2.2 Subbagian Keuangan; dan
 - 2.3 Subbagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan, membawahi :
 - 3.1 Pengendali Dampak Lingkungan
 - 3.2 Analis Lingkungan Hidup
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahi :
 - 4.1 Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup
 - 4.2 Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
 - 4.3 Kelompok Jabatan Fungsional
 - 4.4 Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi :
 - 5.1 Pengendali Dampak Lingkungan Hidup
 - 5.2 Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

6. Bidang Penataan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi :

6.1 Pengawas Lingkungan Hidup

6.2 Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai didukung dengan adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai sebagai berikut:

1. UPT. Laboratorium, yang terdiri dari:

1.1 Kepala UPT ; dan

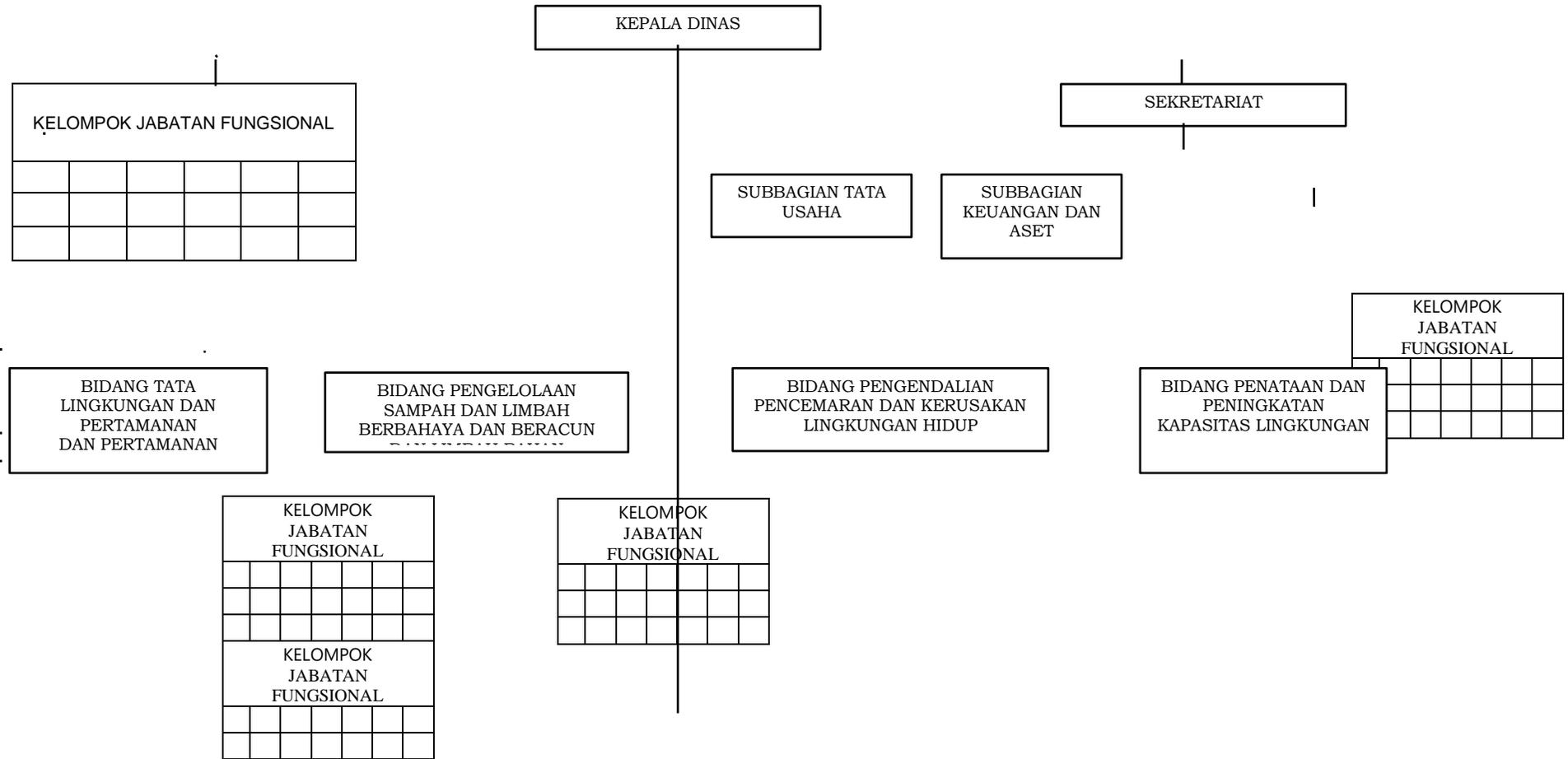
1.2 Kasubbag Tata Usaha

2. UPT. Persampahan, yang terdiri dari:

2.1 Kepala UPT ; dan

2.2 Kasubbag Tata Usaha

Gambar I.1
 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai
 BAGAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL							

UPT

1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKjIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2023, dengan tujuan :

- 1.3.1 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 1.3.2 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 1.3.3 Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya;
- 1.3.4 Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu–isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

Isu strategis terkait dengan urusan Lingkungan Hidup yang perlu ditangani sebagai berikut :

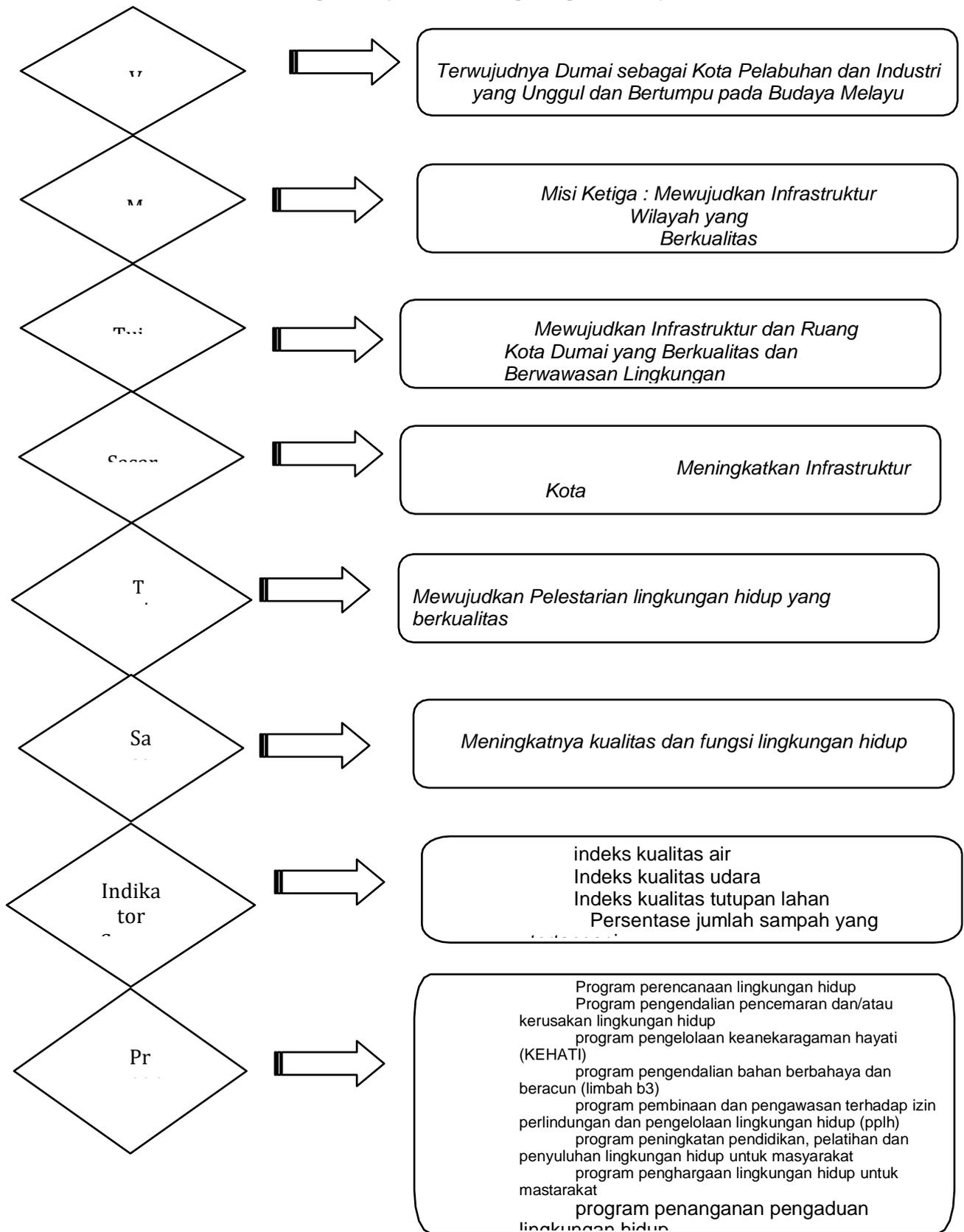
1. Belum optimalnya pengelolaan sampah menjadi nilai ekonomis dan nilai jual bagi masyarakat
2. Banyaknya izin usaha pelaku industri yang kewenangan penanganannya dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat menyebabkan lambatnya proses penanganan pengaduan yang disampaikan oleh pemerintah daerah untuk ditindaklanjut oleh pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat.
3. Minimnya Tenaga Aparatur dalam pengawasan lingkungan hidup dimana pengawasan oleh Aparatur sangat diperlukan apalagi dengan semakin meningkatnya aktifitas di sektor industri baik dari segi jumlah industry yang ada, industri baru yang berdiri maupun perluasan atau pengembangan industri tersebut

4. Belum optimalnya Koordinasi seluruh stake holder serta lembaga pendidikan dalam mewujudkan program adiwiyata baik administrasi dan data dukung untuk partisipasi keikutsertaan tingkat provinsi dan pusat
5. Capaian Indikator Kinerja Kualitas tutupan lahan sudah kategori angka baik, namun dengan terbatasnya peruntukan lahan ruang terbuka hijau yang dikelola oleh pemerintah menyebabkan terkendalanya capaian target kinerja, banyaknya lahan konsesi yang dikuasai oleh pelaku usaha industry
6. Capaian Indikator Kinerja Kualitas air sudah kategori angka baik, namun dengan kondisi air sungai merupakan badan gambut dengan kadar BOD dan COD yang tinggi sehingga hasil uji nilai parameter BOD dan COD melebihi baku mutu

1.5 Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I. 2
Cascading Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai



1.6 Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana skema berikut:

Gambar I. 3
Peta Proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

PROSES BISNIS/Sasaran		SUB PROSES BISNIS /Strategi		Peta Lintas Fungsi / Arah Kebijakan / Kegiatan (pilih "Arah Kebijakan" saja atau "Kegiatan" saja)		OPD PENANGGUNG JAWAB
	1	2		3		4
Kode	PROSES UTAMA	Kode		Kode		
DLH 01	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup	DLH 01.01	Peningkatan kualitas air	DLH 01.01.01	Mengoptimalkan peran swasta dalam pengelolaan Kualitas Air	DLH
		DLH 01.02	Peningkatan kualitas Lahan	DLH 01.02.01	Meningkatkan peruntukan lahan pengelolaan ruang terbuka hijau	
DLH 02	Meningkatnya kualitas persampahan	DLH 02.01	Peningkatan kualitas persampahan	DLH.02.01.01	Meningkatkan penanganan sampah dan pengurangan sampah dari sumbernya	
DLH 03	Meningkatnya partisipasi kesadaran lingkungan	DLH 03.01	Peningkatan kesadaran lingkungan	DLH 03.01.01	Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kesadaran didalam pengelolaan lingkungan	
DLH 04	meningkatkan akuntabilitas dan transparasi	DLH 04.01	Peningkatan kualitas akuntabilitas	DLH 04.01.01	Meningkatkan pelayanan informasi didalam pengelolaan lingkungan hidup	
DLH 05	Meningkatkan pengawasan lahan konservasi	DLH 05.01	Membatasi wilayah konservasi	DLH 05.01.01	Meningkatkan pembinaan didalam pengawasan fungsi lahan	
DLH 06	Meningkatkan kualitas SDM Aparatur	DLH 06.01	Peningkatan kualitas SDM Aparatur	DLH 06.01.01	meningkatkan Kualitas SDM aparatur melalui bimbingan teknis pengelolaan lingkungan	

Sumber data : Peta Proses Bisnis DLH Kota Dumai, 2023

1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/1311.1/INSP-S Tanggal 08 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023, telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

Tabel I.1
Rekomendasi atas Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Kelemahan/ Kekurangan	Saran/ Rekomendasi
1.	Dalam rangka mendorong peningkatan akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah di Kota Dumai mendatang, khususnya pada Dinas Lingkungan Hidup, maka terdapat beberapa rekomendasi perbaikan demi terwujudnya pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil	<p>Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen pelaporan kinerja dengan cermat dalam menyusun LKjIP khususnya terkait dengan pengungkapan seluruh informasi dan perbandingan capaian kinerja</p> <p>Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen evaluasi kinerja dengan menindaklanjuti rekomendasi APIP atas hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022</p>

Sumber data : DLH Kota Dumai, 2023

Sebagai tindaklanjut terhadap rekomendasi yang diberikan, telah dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel I. 2
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Langkah-Langkah Tindak Lanjut	Waktu Penyelesaian
1.	<p>Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 mendatang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai akan lebih cermat dalam penyampaian narasi perbandingan capaian kinerja perangkat daerah, yakni perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini dan tahun lalu, perbandingan dengan target di level nasional (<i>benchmark</i>) serta penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja.</p> <p>Output : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2023</p>	15 Januari 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun Anggaran 2023

2.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai telah menindaklanjuti rekomendasi APIP atas Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022, Output : Matrik Rencana Aksi Tindak Lanjut SAKIP Tahun 2022 https://drive.google.com/drive/folders/14Pw6r_2KEp89_Nbh0Y12Hf8CFqBBrZnM?usp=sharing	21 Agustus 2023
----	--	-----------------

Sumber data : Matrik Tindak Lanjut LHE DLH Kota Dumai, 2023

BAB II PERENCANAAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2023 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2023.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang disebut sebagai nawacita kedua.

Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:

Gambar II. 1



2.2 Tujuan Dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 – 2026.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II. 1
Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2023

VISI : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)					
MISI KE 3 : Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas					
Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Mewujudkan Infrastruktur dan Ruang Kota Dumai yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Daerah	59,26 Indeks	Meningkatnya Infrastruktur Kota	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Daerah	60,77%

Sumber: RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026

2.3 Kebijakan, Strategi dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

Tabel II. 2
Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2023

VISI : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)			
MISI KE 3 : Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Pelestarian lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup	Penyediaan, Pemeliharaan/Perbaikan, Peningkatan kualitas infrastruktur Bidang Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas, kuantitas dan pemerataan infrastruktur bidang Lingkungan Hidup

Sumber data : Renstra Perubahan DLH Kota Dumai 2021-2026

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Perlindungan Dan Pengelolaan

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Perlindungan Dan Pengelolaan
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
9. Program Pengelolaan Sampah

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II. 3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

NO	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup	indeks kualitas air
		Indeks kualitas udara
		Indeks kualitas tutupan lahan
		Persentase jumlah sampah yang tertangani

Sumber data : Perubahan Renstra DLH Kota Dumai 2021-2026

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Dinas Lingkungan Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Dinas Lingkungan Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2023.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Lingkungan Kota Dumai di Tahun 2023

adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel II. 4
Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Lingkungan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup	indeks kualitas air	53.3%
		Indeks kualitas udara	71%
		Indeks kualitas tutupan lahan	61%
		Persentase jumlah sampah yang tertangani	65.7

Sumber data : Perjanjian Kinerja DLH 2023

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 36,554,398,949,- (*Tiga Puluh Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*) untuk melaksanakan 10 (Sepuluh) Program Kerja antara lain :

Tabel II. 5
Program kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Rp. 5,694,679,364	APBD
2.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 433,994,930	APBD
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp. 5,689,944,420	APBD
4.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 1,241,260,000	APBD
5.	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Rp. 28.701.700	APBD
6.	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Rp. 133.380.000	APBD

7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 149,495,787	APBD
8.	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Rp. 65.479.536	APBD
9.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 55.463.061	APBD
10.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 12,918,542,152	APBD
J U M L A H		Rp. 28,288,445,868	APBD

Sumber data : DPA DLH Kota Dumai, 2023

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel II. 6
Perubahan Program kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Rp. 5,716,192,764	APBD-P
2.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 824.451.930	APBD-P
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp. 10.614.417.668	APBD-P
4.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 1.792.888.500	APBD-P
5.	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Rp. 28.701.700	APBD-P
6.	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Rp. 133.380.000	APBD-P
7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 149.435.087	APBD-P
8.	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Rp. 65.479.536	APBD-P

9.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 55.463.061	APBD-P
10.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 10.049.114.627	APBD-P
J U M L A H		Rp. 36.554.398.949	APBD-P

Sumber data : DPPA DLH Kota Dumai, 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI TAHUN 2023

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukur kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Perpres Nomor 29 Tahun 2014).

Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

$$\text{a. Rumus : } \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\ \text{capaian} =$$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

$$\text{b. Rumus : } \text{capaian} = \frac{\text{target} - \text{realisasi} - \text{target}}{\text{target}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu :

Tabel III. 2
Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai telah menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel III. 3 dan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel III. 3
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup	indeks kualitas air	53.2	100%	53,3	53,3	100%	Sangat Berhasil
2.		Indeks kualitas udara	70	70%	73	73	100%	Sangat Berhasil
3.		Indeks kualitas tutupan lahan	61	98%	61	61	100%	Sangat Berhasil
4.		Persentase jumlah sampah yang tertangani	57	100%	65,7	65,7	100%	Sangat Berhasil

Sumber data: Laporan Capaian Kinerja 2023

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama ini sebagai berikut:

1. **Indeks Kualitas Air**

a. **Capaian Kinerja**

untuk indikator indeks kualitas air menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 53.3 realisasi sebesar 53.3 tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 53.2 atau tercapai sebesar 100% maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 47%. Indeks Kualitas Air ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kualitas air (Air sumur dan Air sungai) di Kota Dumai yang dilaksanakan di beberapa wilayah/Kecamatan di Kota Dumai. Pelaksanaan pengambilan sampel dilaksanakan 2 (Dua) kali dalam satu tahun (semester I dan semester II), Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 192.420.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.192.032.759,- atau sebesar 99.80%, salah satu kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah adalah melakukan Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup termasuk dalam Pemantauan dan Pengendalian kualitas lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator

Capaian indikator kinerja merupakan pelaksanaan program yang telah ditetapkan yang ditetapkan guna pencapaian misi dan rencana-rencana yang ditetapkan untuk masa yang akan datang.

c. Faktor penghambat Capaian Indikator

Capaian Indikator Kinerja Kualitas air sudah kategori angka baik, namun dengan kondisi air sungai merupakan badan gambut dengan kadar BOD dan COD yang tinggi sehingga hasil uji nilai parameter BOD dan COD melebihi baku mutu

d. Tindak lanjut Capaian Indikator

Terbentuknya koordinasi seluruh stake holder (Pemerintah, swasta dan masyarakat) terkait partisipasi, kebersamaan dan kesadaran dalam mengelola Lingkungan Hidup yang berdampak terhadap pengelolaan lingkungan Hidup Yang bersih, dinamis dan berkelanjutan.

Gambar III. 1
Dokumentasi Kegiatan Uji Udara Ambien dan Uji Air
Permukaan Tahun 2023

Rp 28.288.445.868

Rp 8.265.953.081

Rp 36.554.398.949



2. Indeks kualitas udara

a. Capaian kinerja

untuk indikator Indeks kualitas udara menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 71 realisasi sebesar 71 tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 70 atau tercapai sebesar 100% maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 25%. Target dari indikator sasaran ini yaitu terlaksananya kegiatan pengujian kualitas udara dengan menggunakan metode Passive Sampler di 4 titik lokasi pengambilan sampel yaitu PT. Meridan Sejati Surya Plantation untuk kategori Industri, Taman Bukit Gelanggang untuk kategori Transportasi, Kelurahan Jaya Mukti untuk kategori Pemukiman, dan Kantor Walikota Dumai untuk kategori Perkantoran. Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan anggaran APBN dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

a. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator

kebijakan terkait pengelolaan Lingkungan dalam bidang pengawasan lingkungan hidup dan mengoptimalkan aktivitas merumuskan kebijakan, mengembangkan sarana prasarana, teknologi, serta pembinaan terhadap berbagai aktifitas yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan..

b. Faktor penghambat Capaian Indikator

Minimnya Tenaga Aparatur dalam pengawasan lingkungan hidup dimana pengawasan oleh Aparatur sangat diperlukan apalagi dengan semakin meningkatnya aktifitas di sektor industri baik dari segi jumlah industry yang ada, industri baru yang berdiri maupun perluasan atau pengembangan industri tersebut

c. Tindak lanjut Capaian Indikator

Koordinasi serta edukasi dengan pelaku usaha/ industri dalam berbagai aktivitas lingkungan untuk bersama menjaga kelestarian lingkungan hidup

3. Indeks kualitas tutupan lahan

a. Capaian kinerja

untuk indikator Indeks kualitas udara menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 61.5 realisasi sebesar 61.5 tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 61 atau tercapai sebesar 100% maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 25%. Wilayah Kota Dumai didukung oleh 13 jenis tutupan lahan yaitu Bangunan Permukiman/Campuran, Danau/Telaga Alami, Hutan Lahan Tinggi, Hutan Mangrove, Hutan Rawa/Gambut, Hutan Tanaman, Kolam Air Tawar, Lahan terbuka, Perkebunan, Rawa Pedalaman, Semak dan Belukar, Sungai, Tanaman Semusim Lahan Kering dengan total keseluruhan 204,139.23 ha. Luas tutupan lahan terbesar terdapat pada jenis perkebunan dengan luas 83,889.86 Ha, sedangkan jenis tutupan lahan terkecil terletak pada jenis tutupan lahan Rawa Pedalaman dengan lahan 12.36 Ha.

Gambar III. 2
Dokumentasi Koordinasi Potensi Proklamasi KTH
Tahun 2023



b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Persentase Penyediaan lahan penghijauan yang ditentukan adalah sebagai berikut:

- Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam mendukung Program Walikota Dumai Hijau

c. Faktor penghambat Capaian Indikator

- Masih banyaknya lahan konsesi di daerah Pemerintah Kota Dumai sehingga mempersulit izin melakukan penghijauan di daerah tersebut

d. Tindak lanjut Capaian Indikator

- Kedepannya Dinas Dinas Lingkungan Hidup akan berupaya bersama perusahaan dalam melakukan penghijauan di Kota Dumai.

4. Persentase jumlah sampah yang tertangani

a. Capaian kinerja

untuk indikator Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 65.7 realisasi sebesar 65.7 tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 57 atau tercapai sebesar 100% maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 35%.

Target Persentase jumlah sampah yang tertangani pada indikator sasaran kegiatan ini yaitu Jumlah dokumen peraturan pengelolaan sampah dengan adanya perubahan indikator Kinerja pengelolaan sampah menjadi persentase. untuk tahun 2023 kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang IKU salah satunya adalah kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dimana kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 11.234.696.065,- danrealisasi keuanganRp. 11.004.831.471,- Jika dilihat dari alokasi anggaran dan realisasi anggaran kegiatan ini dapat terserap atau 97.95%.sedangkan pada sub. kegiatan Penyediaan Sarana danPrasarana PengelolaanPersampahan di TPA/TPST/SPAKabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp.2.989.904.100,- danrealisasi keuanganRp.2.179.300.000,-Jika dilihat dari alokasi anggaran dan realisasi anggaran kegiatan ini dapat terserap atau 95.35%.

Gambar III. 3
Dokumentasi TPA/TPS Tahun 2023



b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator

- Pengelolaan sampah di TPA dengan menggunakan metode pengurangan sampah terpadu dengan sistim daur ulang MASARO (Masalah Sampah Zero) sehingga mengurangi masalah sampah pada tahun 2023

c. Faktor penghambat Capaian Indikator

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya yang telah di sediakan di tps masing-masing

d. Tindak lanjut Capaian Indikator

Perlunya sosialisasi secara konverensif kepada masyarakat agar masyarakat membuang sampah pada tempatnya.

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel III. 4
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup	indeks kualitas air	53.2	53.3	53.3	53.3	100%	100%
2.		Indeks kualitas udara	70	71%	71%	71%	100%	100%
3.		Indeks kualitas tutupan lahan	61	61.5	61.5	61.5	100%	100%
4.		Persentase jumlah sampah yang tertangani	57	65.7	65.7	65.7	100%	100%

Sumber data : DLH Kota Dumai Tahun 2023

Pada tahun 2022 terdapat 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup selama 5 tahun kedepan, namun Tidak ada mengalami perubahan Indikator di Tahun 2023. Capain kinerja terhadap realisasi kinerja merupakan pelaksanaan program yang telah ditetapkan yang ditetapkan guna pencapaian misi dan rencana-rencana yang ditetapkan untuk masa yang akan datang. Dalam hal ini, realisasi kinerja dapat dilakukan berdasarkan hasil perhitungan PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) dengan perbandingan nilai antara masukan/input dan keluaran/output baik untuk rencana tingkat capaian target maupun realisasi kegiatan.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) tahun 2023 dapat dikatakan *SANGAT BERHASIL*.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel III. 5
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup	indeks kualitas air	53.3	100%	100%
		Indeks kualitas udara	71	100%	100%
		Indeks kualitas tutupan lahan	61.5	100%	100%
		Persentase jumlah sampah yang tertangani	65.7	100%	100%

Sumber data : DLH Kota Dumai Tahun 2023

Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam mempercepat Capaian Kinerja sampai dengan akhir periode RENSTRA Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indikator persentase prasarana transportasi, Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya untuk melakukan:

- Menyusun rencana pembangunan prasarana transportasi sebagaimana yang telah tertuang di dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2021-2026

Pengukuran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai mencakup: Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (Rencana Tingkat Capaian) dari masing-masing kelompok Indikator Kinerja. Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 telah menetapkan Pengukuran Kinerja

- menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan. Pengumpulan dan Pengelolaan Kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan
2. Kinerja Instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektif.
 3. Strategi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan RPJM yang dilaksanakan Tahun 2021-2026 adalah merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan dalam pembangunan kota Dumai 5 Tahun kedepan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan tahun 2021-2026 ada beberapa strategi yang dicapai adalah:
 - a. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian terhadap pencemaran lingkungan.
 - b. Meningkatkan kualitas lingkungan kawasan pesisir,
 - c. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi terhadap kegiatan/usaha yang memiliki potensi mencemari lingkungan.
 - d. Meningkatkan sarana prasarana dan pemahaman masyarakat terhadap adaptasi perublim dan konservasi sumber daya alam.
 - e. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
 - f. Meningkatkan jumlah taman kota dan sarana prasarana pendukung pengelolaan RTH
 - g. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - i. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan
 - j. Meningkatkan kualitas lingkungan kawasan pesisir.pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alamdan lingkungan hidup.

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM) sebagaimana tabel III. 6 berikut :

Tabel III. 6
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup	indeks kualitas air	53.3	-	Tidak Ada Target Nasional yang berhubungan langsung dengan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai
		Indeks kualitas udara	71%	-	
		Indeks kualitas tutupan lahan	61.5	-	
		Persentase jumlah sampah yang tertangani	65.7	-	

Sumber data : DLH Kota Dumai Tahun 2023

3.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Lingkungan Hidup Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 36.554.398.949 bersumber dari APBD Kota Dumai. Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp. 28.288.445. dan BELANJA MODAL sebesar Rp 8.265.953.081

3. Belanja Operasi

4. Belanja Modal

J u m l a h

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 35.315.931.972 terdiri dari Belanja Operasi Rp. 27.229.125.056 (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Puluh Enam Rupiah) dan Belanja Modal terealisasi Rp 8.086.806.916 (Delapan Milyar Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah)

1. Belanja Operasi

2. Belanja Modal

J u m l a h

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel III. 7
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	12.117.701.188	11.933.109.953	98,48
2		Program Pengelolaan Persampahan	14.224.600.165	13.855.799.271	97.41

Sumber data : DLH Kota Dumai Tahun 2023

Total anggaran belanja adalah Rp 36.554.398.949 dengan realisasi Rp 35.315.931.972 atau dengan capaian sebesar 96,61% dari total anggaran. Anggaran tidak dapat terserap 100% dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi di antaranya:

- Secara umum, seluruh kegiatan pada 2 (dua) program prioritas diatas telah selesai dan terealisasi 100% fisiknya, namun realisasi keuangannya terealisasi sebesar 98,48% atau sisa 0,95% yang merupakan silpa dari setiap sub-sub kegiatan. Artinya adanya efisiensi dari penggunaan anggaran di tahun 2023.

3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel III. 8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

TUJUAN/ SASARAN / PROGRA M	INDIKATOR	KINERJ A			ANGGARAN		
		TARGE T	REALISAS I	CAPAIA N	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Tujuan: Mewujudkan Pelestarian lingkungan hidup yang berkualitas	indeks kualitas air	53.3	53.3	100%			
Sasaran: Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup	Indeks kualitas udara	71	71	100%			
	Indeks kualitas tutupan lahan	61	61	100%			
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	65.7	65.7	100%			
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintah an bidang lingkungan hidup	75%	75%	75%	6,674,297, 7827	5,574,397,2 34	99,05%
Program perencanaa n lingkungan hidup	Persentase perencanaa n lingkungan hidup	75%	75%	75%	1,792,888, 500	1,458.256.6 51	99,96%
Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase pengendalia n pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	75%	75%	75%	1,262,451, 930	1,162,951.2 50	95,55%
Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Persentase pengelolaan keanekaragam an hayati	70%	70%	70%	12,117,701, 188	11,065,701,0 00	95,55%

Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun	70%	70%	70%	28,701,700	25,600,700	99,55%
Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	73%	73%	73%	133,380,000	125,145,200	97,55%
Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	73%	73%	73%	149,435,087	135,435,257	94.05%
Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	75%	75%	75%	65,479,536	59.025.321	93.25%
Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat	75%	75%	75%	55,463,061	50,363,000	99.23
Program pengelolaan persampahan	Persentase timbulan sampah yang tertangani	65.7%	65.7%	65.7%	14,274,600, 165	13,123,978,4 75	92,67%

Sumber data : DLH Kota Dumai Tahun 2023

3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam mengukur akuntabilitas keuangan dilakukan evaluasi lanjutan dalam bentuk efisiensi penggunaan sumber daya. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel III. 9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi		Keterangan
1	2	3	4	5	6		7
1.	Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	Indeks kualitas lingkungan hidup	61,55	99,05	1,01	Efisien	-
		Jumlah pelayanan persampahan yang tertangani	65,7	99,05	1,47	Efisien	-

Sumber data : DLH Kota Dumai Tahun 2023

- a. Pada *Indikator Kinerja Utama 1* yaitu *Indeks kualitas lingkungan hidup* tingkat efisiensinya adalah 1,01 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (61,55) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,05%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- b. Pada *Indikator Kinerja Utama 2* yaitu *Jumlah pelayanan persampahan yang tertangani* adalah 1,47 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (65,7) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,05%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;

3.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.10
Prestasi dan Penghargaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	ADIPURA	Peringkat Pertama Kluster Pendukung	Kota Dumai	Walikota Dumai

Sumber data : DLH Kota Dumai Tahun 2023

Pada Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai mendapatkan penghargaan dari Walikota Dumai sebagai **PERINGKAT PERTAMA** pada Kluster Pendukung berkaitan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan Predikat **“BB” (SANGAT BAIK)** dengan nilai **77,85**.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. LKj-IP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Dilain pihak, LKj-IP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2023 disusun berdasarkan Perubahan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 dengan kesesuaian Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, Dokumen RKPD tahun 2022, Capaian IKU Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2023 serta Perjanjian Kinerja 2023 beserta perubahannya. Dalam laporan ini mengukur Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai yang terdiri atas 2 Tujuan Indikator Utama dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pada *Indikator Kinerja Utama 1 yaitu Indeks kualitas lingkungan hidup* tingkat efisiensinya adalah 1,01 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (61,55) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,05%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil**;
- b. Pada *Indikator Kinerja Utama 2 yaitu Jumlah pelayanan persampahan yang tertangani* adalah 1,47 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (65,7) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,05%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil**;

B. LANGKAH PERBAIKAN / SARAN

1. Bangun kebersamaan dengan melakukan koordinasi dan edukasi antar lintas sektor terkait dalam penanganan dan pengurangan sampah yang dapat dimanfaatkan menjadi nilai ekonomis
2. Menekankan upaya preventif agar pencemaran/Kerusakan lingkungan dapat diminimalisir berbagai pihak terutama bagi pelaku industri dan masyarakat sehingga lingkungan bersih dari pencemaran.
3. Koordinasi serta edukasi dengan pelaku usaha/ industri dalam berbagai aktivitas lingkungan untuk bersama menjaga kelestarian lingkungan hidup
4. Upaya preventif seluruh stake holder serta lembaga pendidikan dalam keikutsertaanya melaksanakan program lingkungan bersih dan sehat khususnya antar lembaga pendidikan.

Demikian beberapa hal yang dapat Kami sampaikan dalam LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2023 semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang tulus dan ikhlas dalam-sama membangun Kota Dumai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dumai, 10 Januari 2024



 KEPALA,
 AGUS GUNAWAN, S.Sos
 Pembina I/(IV/a)
 NIP. 197708312000031005

: Rp 28.288.445.868

: Rp 8.265.953.081

: **Rp 36.554.398.949**

: Rp 27.229.125.056

: Rp 8.086.806.916

: **Rp 35.315.931.972**

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2021 - 2026**

VISI : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu
MISSION : Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup
SASARAN : Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup

TUJUAN		SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN				KET							
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM	
1. Mewujudkan Pelaksanaan lingkungan hidup yang baik/kuualitas	2. Indeks kualitas lingkungan hidup	PERSENTASE PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	4	5	6	7	8	9	10	11	Indeks kualitas lingkungan hidup	PERSENTASE pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Program indeks kualitas air	23
			61.09	61.34	61.55	61.76	62.1	62.1	62.1	62.1	Memoptimala kualitas dan fungsi lingkungan hidup		53.1	53.2	53.3	53.4	53.5	53.6			Memastikan kualitas, kuantitas dan pemerataan Infrastruktur bidang lingkungan hidup	Program indeks kualitas air	
											Indeks kualitas udara	PERSENTASE Pengelolaan Kelembagaan dan Hayati										Program indeks kualitas udara	
											Indeks kualitas tutupan lahan	PERSENTASE monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat										Program Indeks kualitas tutupan lahan	
											Jumlah sampah yang tertangani	PERSENTASE timbulan sampah yang tertangani										Program jumlah sampah yang tertangani	

**RENCANA KINERJA TAHUN 2023
TAHUN 2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Target Pelaksanaan				Program	Indikator Program	Target	Pagu
					TW1	TW2	TW3	TW4				
1	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Indeks	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	75%	433.994.930
		Indeks kualitas udara	Indeks	71	71	71	71	71	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	70%	3.326.811.455
		Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	61	61	61	61	61	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat	75%	55.463.061
		Persentase sampan yang tertangani	%	65,7	65,7	65,7	65,7	65,7	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah yang tertangani	65,7%	6.389.114.627

Dumai, Januari 2023



PENGUKURAN KINERJA

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup
 Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	FORMULASI PERHITUNGAN	Target	Realisasi	Capaian 2023
1.	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	$\frac{\text{Jumlah Kualitas Air}}{\text{Jumlah Kualitas Air yang seharusnya tersedia}} \times 100$	53,3%	53,3%	100%
		Indeks Kualitas Udara	$\frac{\text{Jumlah Kualitas Udara}}{\text{Jumlah Kualitas Udara yang seharusnya tersedia}} \times 100$	73	71	100%
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$\frac{\text{Jumlah Kualitas Tutupan Lahan}}{\text{Jumlah Kualitas Tutupan Lahan yang seharusnya tersedia}} \times 100$	61	61	100%
		Persentase jumlah sampah yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah Sampah yang tertangani}}{\text{Jumlah Sampah yang tertangani yang seharusnya tersedia}} \times 100$	65,7%	65,7%	100%


 KEPALA
 AGUS GUNAWAN, S.Sos
 Pembina I/(I/a)
 NIP. 197708312000031005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DAMERIA, SKM, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI**

selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**

Jabatan : **WALI KOTA DUMAI**

selaku atasan ***pihak pertama***, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,

H. PAISAL, SKM, MARS

Pihak Pertama,

DAMERIA, SKM, M.Si

NIP : 19640605 198603 2 006

Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJATAHUN 2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2023
1.	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup	1. indeks kualitas air	Indeks	53,3
		2. Indeks kualitas udara	Indeks	71
		3. Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	61
		4. Persentase sampah yang tertangani	%	65,7

1. Sasaran 1 :	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup	1 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp.	433.994.930
		2 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp.	3.326.811.455
		3 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp.	1.241.260.000
		4 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp.	55.463.061
		5 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan	Rp.	28.701.700

Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

7	Rp.	149.495.787
---	-----	-------------

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

8	Rp.	65.479.536
---	-----	------------

Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

9	Rp.	6.389.114.627
---	-----	---------------

Jumlah Rp. 11.823.701.096

WALI KOTA DUMAI,

H. PAISAL, SKM, MARS.

Dumai, Januari 2023
KEPALA,

DAMERIA, SKM, M.Si
NIP : 19640605 198603 2 006



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUHERMAN,S.Sos
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. PAISAL, SKM, MARS
Jabatan : WALIKOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2023 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA

H. PAISAL, SKM, MARS.

PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala

SUHERMAN,S.Sos

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2023
1.	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup	1. indeks kualitas air	Indeks	53,3
		2. Indeks kualitas udara	Indeks	71
		3. Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	61
		4. Persentase sampah yang tertangani	%	65,7

1. Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup	1 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 1.262.451.930
	2 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp. 12,117,701,188
	3 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 1,792,888,500
	4 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 28,701,700
	5 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 133,380,000

6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp.	149,435,087
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp.	55,463,061
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp.	65,479.536
9	Program Pengelolaan Persampahan	Rp.	14,274,600,165
Jumlah		Rp.	29.880.101.167

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA

H. PAISAL, SKM, MARS.

PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala

SUHERMAN, S.Sos
NIP : 19680715 199903 1 003

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2023**

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI (RP)	PERSENTASE
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,674,297,782	5,833,482,957	87.40
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112.000.000	104.666.700	93.45%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	24.537.500	98.15%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.000.000	15.052.000	75.26%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	20.000.000	19.608.000	98.04%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.000.000	12.886.000	99.12%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	13.000.000	12.566.000	96.66%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	14.273.900	95.16%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	5.743.300	95.72%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.499.197.209	4.098.131.773	91.09%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.461.957.209	4.060.891.773	91.01%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.240.000	27.240.000	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	10.000.000	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	634.193.771	272.997.774	43.05%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.893.400	27.893.400	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	221.617.121	212.579.225	95.92%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.595.000	14.588.000	99.95%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.681.200	58.637.300	99.93%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.540.000	14.580.000	88.15%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	294.867.050	294.280.645	99.80%

Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	787.497.652	669.906.172	85.07%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	246.512.332	133.755.693	54.26%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.000.000	33.000.000	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	507.985.320	503.150.479	99.05%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	241.089.800	240.387.942	99.71%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	206.430.000	205.728.142	99.66%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.659.800	34.659.800	100%
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	824.727.930	817.740.436	99.19%
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	824.451.930	817.740.436	99.19%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	694.233.000	692.847.833	99.80%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	50.000.000	44.713.800	89.43%
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	80.218.930	80.178.803	99.95%
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	12.117.701.188	11.933.109.953	98.48%
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	12.117.701.188	11.933.109.953	98.48%
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	243.740.000	238.471.780	97.84%
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	11.873.961.188	11.694.638.173	98.49%
PROGRAM PERENCAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.792.888.500	1.680.023.509	93.70%
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kota	551.628.500	490.586.755	88.93%
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	551.628.500	490.586.755	88.93%

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	1.241.260.000	1.226.131.042	98.78%
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	1.241.260.000	1.226.131.042	98.78%
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	338.000.000	335.632.170	99.30%
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	338.000.000	335.632.170	99.30%
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	268.000.000	266.356.920	99.39%
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	70.000.000	69.275.250	98.96%
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERCAUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	28.701.700	23.151.990	80.66%
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	28.701.700	23.151.990	80.66%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	28.701.700	23.151.990	80.66%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	133.380.000	67.651.000	50.72%
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	133.380.000	673651.000	50.72%
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	75.000.000	74.621.800	99.50%
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	58.380.000	54.086.000	92.64%
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	149.435.087	121.608.833	81.38%
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	143.435.087	121.608.833	81.38%
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	49.495.787	25.678.637	51.88%
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	99.939.300	95.930.196	95.99%

Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	99.939.300	95.930.196	95.99%
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	65.479.536	2.485.000	3.80%
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65.479.536	2.485.000	3.80%
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	65.479.536	59.403.150	90.72%
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	55.463.061	49.349.000	88.98%
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	55.463.061	49.349.000	88.98%
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	55.463.061	49.349.000	88.98%
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	14.274.600.165	13.896.610.771	97.35%
Pengelolaan Sampah	14.224.600.165	13.855.799.271	97.41%
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	11.234.696.065	11.004.831.471	97.95%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.989.904.100	2.950.967.800	95.35%
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	50.000.000	40.811.500	100%
Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	50.000.000	40.811.500	100%
TOTAL	36.554.398.949	35.315.931.972	96.61

Dumai, Januari 2024

KEPALA,



AGUS GUNAWAN, S.Sos
Pembina I/(IV/a)
NIP. 197708312000031005



PENGHARGAAN ADIPURA TAHUN 2022

